



**Wisatawan Datang Sampah Menggunung, Mau Sampai Kapan?**

TAJUK

barat dua sisi mata uang, dilonggarkannya aturan mudik dan liburan saat Lebaran tahun ini memiliki sisi positif dan negatif bagi DIY. Sisi positifnya, kebijakan pemerintah tersebut berdampak pada bergeraknya kembali perekonomian masyarakat. Akan tetapi sisi negatifnya, selain kemacetan lalu lintas, persoalan lainnya juga timbul, salah satunya adalah sampah. Melonjaknya wisatawan di sejumlah tempat wisata di Kota Jogja berdampak pada peningkatan volume sampah. Malioboro sebagai salah satu destinasi yang populer mengalami kenaikan volume sampah yang berlipat ganda. Kepala UPT Pengelola

Kawasan Cagar Budaya, Ekwanto, mengatakan peningkatan volume sampah di kawasan Malioboro sudah terjadi sejak akhir pekan lalu, bersamaan dengan geliat kunjungan wisatawan sejak H-1. Bahkan, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja, volume sampah di Jogja meningkat 15% selama libur Lebaran tahun ini meski peningkatan itu tak cuma bersumber dari Malioboro, tetapi juga dari daerah lain, termasuk di antaranya dari rumah tangga. Tak heran jika pemerintah, khususnya DLH Kota Jogja berharap tak ada penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan selama libur Lebaran ini. Diketahui, TPST Piyungan

memang sempat tutup beberapa hari lalu dan baru mulai kembali buka sejak Selasa (3/5). Petugas sempat menahan sampah di kantor setempat dan menunggu TPST Piyungan beroperasi kembali. Itulah sebabnya, sudah seharusnya jika pemerintah, dalam hal ini Pemda DIY memiliki rencana jangka panjang untuk menyambut lonjakan wisatawan. Terlebih dengan beberapa rencana proyek pengembangan pariwisata di Borobudur. Salah satu yang mendesak untuk direalisasikan adalah kerja sama dengan badan usaha soal *recycling* sampah harus segera direalisasikan. Pemaksimalkan tempat pembuangan sampah

sementara juga harus dilakukan. Seperti diketahui, Pemda DIY sebelumnya memang telah berencana menata TPST Piyungan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemda DIY mengklaim penyusunan dokumen prastudi kelayakan untuk KPBU TPST ini juga dikebut agar segera bisa menyelesaikan persoalan sampah di DIY. Pemda juga optimistis jika banyak pihak swasta atau badan usaha yang berminat untuk ikut mengelola pembuangan sampah tersebut. Skema ini dipandang menguntungkan dua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Di satu sisi, pemerintah diuntungkan dari sisi pelayanan.

Sementara, pihak swasta mendapatkan untung secara finansial. Oleh sebab itu, jika klaim itu benar adanya, maka tak ada kata lain bagi pemerintah untuk segera merealisasikannya. Betapapun, persoalan sampah adalah persoalan mendasar yang hingga kini belum juga ada solusinya. Lebih dari itu, masyarakat juga harus ikut andil melalui kebiasaan memilah sampah. Kesadaran *reuse, reduce, dan recycle* (3R) sampah harus lebih ditingkatkan. Jika kesadaran memilah sampah masyarakat bisa ditumbuhkan, maka volume sampah yang dibuang di tempat pembuangan pun pasti akan bisa berkurang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005